

REGENERASI ULAMA: ANTARA PESANTREN DAN PENDIDIKAN KADER ULAMA

Rustam Ependi

Hadi Sahputra Penggabean

Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama
Islam dan Humaniora, Universitas Pembangunan Panca
Budi

rustamependi@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Kata Kunci: <i>Regenerasi Ulama, Pesantren, Kader Ulama</i>	Peran ulama di tengah perkembangan komunitas sosial budaya yang disebabkan oleh pandangan, Asumsi dan kenyataan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang kemampuan keilmuan dan kealiman ulama. Pergeseran tersebut juga muncul dari sikap dan pribadi ulama tersebut secara langsung yang ditampilkannya dari peran dan pelaksanaan sosial keagamaan ulama tersebut terhadap masyarakat disatu sisi pesantren yang menerima sistem dan tuntutan perkembangan zaman. Walaupun pendidikan kader ulama mampu menjadi solusi melahirkan kompetensi seorang ulama namun di satu sisi terjadi problematika ketika berbicara legalitas alumninya ketika ingin bekerja secara formal seperti contoh Problematik kelembagaan Pendidikan Tinggi Kader Ulama sampai saat ini adalah keberadaan atau akreditasinya belum dikatakan sebagai pendidikan formal masih bersifat non formal.
--	---

A. PENDAHULUAN

Dalam catatan sejarah, lembaga pendidikan Islam memiliki kesempatan menjadi lembaga pendidikan *par excellence* di dunia Islam. Keberadaan madrasah dulu sangat bergengsi di dunia Islam. Keberadaannya memiliki akar sejarah yang panjang. Melalui Lembaga ini melahirkan generasi ulama yang kharismatik karya-karya mereka bisa dibaca sampai sekarang.

Dalam Islam, para ulama diyakini sebagai pewaris Nabi (waratsah) al-Anbiya), bertugas melanjutkan fungsi Nabi sebagai dakwah yang menyeru umat manusia untuk (menyembah) Allah. Dua warisan utama adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh para ulama adalah (melestarikan) Alquran dan Hadits. Dengan demikian, ini adalah kelas ahli yang bertugas menafsirkan Al-Qur'an, sebagai jiwa dan jantung ortodoksi Islam, adalah ahli hukum serta seorang guru yang telah menguraikan banyak bentuk menentukan isi Islam.

Pendidikan pondok pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia, hingga saat ini menjadi model pendidikan pesantren masih bertahan di tengah modernisasi pendidikan di luar pesantren itu sendiri. Namun, harus juga diakui bahwa pesantren sebelumnya adalah telah mengalami kemuliaan, beberapa telah mengalami kemerosotan historis karena regenerasi tidak dipersiapkan dalam kader ulama yang serius. Sementara arus sangat kuat dunia pesantren sebenarnya ditantang untuk menjawab masalah pendidikan di masyarakat.¹

Satu persatu ulama kharismatik yang menjadi panutan umat berguguran (wafat) dan meninggalkan segala bentuk peran yang dimainkan selama masih hidup. Akibatnya, masyarakat merasa kehilangan, tempat berguru sudah mulai berkurang, tempat mengadu juga sudah tidak ada, pemimpin yang senantiasa dihormati, didengar ucapannya, tidak lagi berada di sekitarnya. Kondisi seperti ini membuat orang khawatir akan masa depan umat, seperti yang pernah dilontarkan oleh Munawir Sjadzali (1987) di hadapan civitas akademika IAIN Syarif Hidayatullah, bahwa "dewasa ini terjadi krisis panutan", dalam hal ini terkait dengan kelangkaan ulama serta banyaknya persoalan kemasyarakatan yang muncul.²

Penyebab kelangkaan ulama lembaga pesantren sebagai tempat kader ulama yang telah mengikuti kurikulum pemerintah. Kemampuan para murid pesantren pun menjadi setengah-setengah tidak lagi menjadi ahli dalam membaca dan memahami kitab kuning, melainkan juga mempelajari pelajaran umum. Banyak juga para santri yang menguasai ilmu umum dibandingkan dengan memahami kitab kuning. Inilah yang menjadi pemikiran MUI, sehingga MUI yang menganggap perlunya melaksanakan Pendidikan Kader Ulama untuk menjadikan orang-orang yang mampu membaca dan memahami kitab kuning, Majelis Ulama Indonesia menyebutnya sebagai target dari Pendidikan Kader Ulama. Sehingga terbentuklah ditengah masyarakat dua bentuk pendidikan untuk regenerasi ulama dilembaga pesantren dan Pendidikan Kader Ulama.

¹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 29.

² Arifuddin Ismail, *Efektivitas Pendidikan Kader Ulama di Berbagai Pesantren Dalam Jurnal "Al-Qalam"* No. XVII Tahun XII Edisi Januari-Juni 2006, hal. 20.

B. PEMBAHASAN

1. Fenomena Kelangkaan Ulama

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tidak terpisahkan dari peran ulama sebagai elit lokal dalam merancang realitas sosial dalam masyarakat yang beradab dan terorganisir. melahirkan dinamika kebangsaan berdasarkan cita-cita bersama.

Masyarakat Indonesia mengenal kata Ulama yang menjadi kata jama' alim, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Bahasa "Ulama" ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balagh dan sebagainya.³

Ulama Mengemban tugas pewaris nabi mengemban beberapa fungsi antara lain, sebagai berikut: (1) *Tabligh*, yaitu menyampaikan pesan-pesan agama, yang menyentuh hati dan merangsang pengalaman. (2) *Tibyan*, yaitu menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan kitab suci secara transparan. (3) *Tahkim*, yaitu menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan adil. (4). *Uswatun Hasanah*, yaitu menjadi teladan yang baik dalam pengamalan agama.⁴

Peran Ulama dalam kehidupan komunitas keagamaan dalam memimpin dan membangun pemikiran moral dan religius di antara masyarakat memang sangat menarik, karena penciptaan manusia yang lengkap dan membuat kemajuan dalam aspek fisik dan spiritual. Dalam hal ini, keberadaan manusia yang akan dibangun terdiri dari unsur fisik dan spiritual. Pentingnya keterlibatan pemimpin agama dalam kegiatan pembangunan adalah dalam aspek pengembangan spiritual. Elemen ini tidak mungkin diisi tanpa keterlibatan pemimpin agama. Dengan demikian, keterlibatan pemimpin agama dalam kegiatan pembangunan tidak bersifat pelengkap, tetapi sebenarnya menjadi salah satu komponen inti dalam seluruh proses pembangunan. Dalam implementasinya, bahkan pemimpin agama dapat memainkan peran yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pengembangan kerohanian masyarakat, tetapi juga dapat bertindak sebagai motivator,

³Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12.

⁴Fatimah Zuhrah, *Pergeseran Peran Dan Posisi Ulama Pada Masyarakat Melayu Di Tanjung Pura Kabupaten Langkat*, dalam *HIKMAH*, Vol. XII, No. 1 Tahun 2016, hal. 90.

pembimbing, dan penyedia fondasi etika dan moral, dan menjadi mediator dalam semua aspek pembangunan di Indonesia.⁵

Akhir-akhir ini posisi dan peran ulama di tengah perkembangan komunitas sosial budaya yang disebabkan oleh pandangan, Asumsi dan kenyataan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang kemampuan keilmuan dan kealiman ulama. Pergeseran tersebut juga muncul dari sikap dan pribadi ulama tersebut secara langsung yang ditampilkannya dari peran dan pelaksanaan sosial keagamaan ulama tersebut terhadap masyarakat.

Dewasa ini jumlah ulama jauh menurun, bahkan saat ini masyarakat Muslim sedang berada dalam kondisi kelangkaan ulama. Sebab ulama sudah terpinggirkan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Permasalahan ini semakin mengemuka ketika begitu banyak orang yang diakui sebagai ulama telah wafat. Namun tidak ada pengganti yang menyamai keilmuannya, sedangkan saat ini terjadi fenomena banyaknya dai, penceramah, ustaz, dan penulis agama tumbuh menjamur di mana-mana. Anehnya tidak sedikit dari mereka ini datang dari orang yang bukan sarjana agama dan tidak berlatarbelakang pendidikan agama, tetapi sarjana umum bahkan ada orang yang tidak pernah mengecap pendidikan di perguruan tinggi. Mereka bukan ahli agama (Islam), tetapi ahli ruang angkasa, ahli obat-obatan, ahli saraf, ahli bangunan, ahli seni, ahli tarik suara, dan bahkan ahli masak.⁶

Belum lagi disatu sisi banyak ulama yang terlibat dalam wilayah politik praktis dengan berbagai pertimbangan sosiologis, psikologis, ideologis, politis dan bahkan pertimbangan ekonomi telah memperkuat anggapan bahwa kesucian makna keulamaan yang selama ini menjadi simbol kepemimpinan ulama umat telah bergeser, apalagi kalau sang ulama itu yang terlibat dalam politik dan tersangkut dengan kasus-kasus tidak bermoral. Berikut ini tokoh agama yang bisa dikategorikan ulama masa kini yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi antara lain:

- a. Said Agil Husin Al-Munawar mantan Menteri Agama (Menag) di era Presiden Megawati Soekarnoputri terlibat korupsi, lulusan Universitas Ummu Al Quro Saudi Arabia terlibat korupsi dana abadi haji periode 2002-2005. Dia divonis lima tahun penjara.
- b. Luthfi Hasan Ishaq, Luthfi adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2009-2014. Dia adalah lulusan Punjab University, Pakistan dan mengambil gelar master dalam program islamic studies. Dia juga merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan pada tahun 1998 yang merupakan cikal bakal dari Partai Keadilan Sejahtera. Namun, karir Luthfi kandas setelah ditetapkan

⁵Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal.138.

⁶Ramli Abdul Wahid, *Peranan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 57.

- sebagai tersangka kasus korupsi yang dilakukannya. Pada akhir Januari 2013, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi. Presiden PKS itu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b Pasal 5 ayat 1 dan 2, atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Luthfi dipenjara selama 16 tahun dengan denda Rp1 miliar serta pencabutan hak politiknya.
- c. Suryadharma Ali Suryadharma Ali merupakan Menteri Agama (Menag) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia merupakan lulusan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 1984. Ia pernah menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian namanya, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dana haji dan masih menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.
 - d. Ahmad Fathanah pernah mengenyam kuliah di Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University, pada tahun 1985. Ia menjadi terkenal sejak ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap kuota impor daging sapi tahun 2013 yang menyeret Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi, dia mengaku sebagai calo proyek impor daging sapi tersebut.
 - e. KH Fuad Amin Imron merupakan Ketua DPRD Bangkalan. Tokoh agama Madura yang sebelumnya menjabat Bupati Bangkalan itu diduga terlibat suap suplai gas dan pembayaran ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelum ditangkap KPK, Fuad Amin sempat menjabat Bupati Bangkalan yang sudah sering tersandung berbagai masalah. Karir politiknya tercoreng, ketika KPK berhasil menangkapnya saat menerima uang suap. Dia saat ini telah divonis delapan tahun bui.
 - f. Gatot Pujo Nugroho Gatot Pujo Nugroho adalah kader terbaik PKS yang merupakan Gubernur Sumatera Utara. Dia dijadikan tersangka oleh KPK bersama istri mudanya Evy Susanti dalam kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Sumatera Utara. Selain tersandung kasus dugaan suap, Gatot juga sedang dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial.⁷

Pada masa lalu, ulama dikenal pula sebagai kaum intelegensia dan elite ilmu agama Islam. Mereka tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan dan menjalankan dakwah ke daerah-daerah tetapi juga menulis ide dan pemikirannya dalam bentuk buku-buku (kitab). Seperti; Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, Syamsuddin al-Sumatrani, Abdurrauf al-Sinkili dari Aceh, Abdussamad al-Palinbani dan Muhammad al-Azhari al Palimbani dari Palembang, Arsyad al-Banjari dan Nafs al-Banjari dari Banjar, dan Nawawi dari Banten. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam yang

⁷<https://nasional.okezone.com/read/2015/12/08/337/1263082/para-tokoh-agama-terjerat-korupsi> dikutip pukul 4 April 2020.

dikembangkan oleh para ulama Indonesia merupakan tradisi keilmuan khas Indonesia.

Para ulama tentu saja berperan penting dalam bidang sosial dan kebudayaan (dalam pengertian yang luas). Dalam hal ini ulama merupakan golongan yang berperan dalam pembentukan sistem nilai, sistem kelembagaan, dan perilaku masyarakat. Secara historis, pendirian lembaga pendidikan Islam biasanya dilakukan dengan membuka lahan baru sehingga memungkinkan munculnya pemukiman baru dan transmigrasi lokal. Demikianlah peranan ulama dalam pengembangan wilayah, pemukiman baru dan transmigrasi. Dalam bidang kebudayaan, para ulama telah mengembangkan sistem budaya ilmu yang unik. Keunikannya adalah bahwa para ulama, dalam melakukan pendidikannya, mengarahkannya kepada pendidikan kerakyatan. Lembaga pendidikan yang diselenggarakannya merupakan *center of excellence* di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Orientasi pendidikan yang dikembangkan para ulama sama sekali tidak bersifat elitis tetapi bersifat kerakyatan. Para ulama telah menanamkan budaya ilmu kepada lapisan masyarakat yang paling bawah.⁸

Menurut Syahrin Harahap mengukur ketokohan seseorang ulama bisa jadi rujukan di era modern ini paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator.

- a. Integritas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilannya dalam bidang yang digeluti hingga memiliki kekhasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya. Integritas tokoh juga dapat dilihat dari sudut integritas tingkah laku dan moralnya.
- b. Karya-karya monumental. Karya-karya tersebut bisa berupa karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sezamannya ataupun masa sesudahnya.
- c. Kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat baik dalam bentuk pikiran. Kontribusi tokoh juga dapat dilihat dari kepemimpinan, keteladanan hingga ketokohnya diakui, diidolakan, diteladani dan dianggap memberikan inspirasi bagi generasi sesudahnya.⁹

Membincang soal ulama, nampaknya tidak semua orang setuju jika dikatakan bahwa umat Islam di Indonesia tengah dilanda krisis ulama. Dalam keadaan demikian, muncul pula konstataasi yang bisa dinilai sebagai lahir dari pengamatan yang cukup independen, bahwa lingkup daerah ulama, kalau pun harus tetap dipertahankan, sudah menyusut jauh dibanding dengan yang pernah dimiliki selama ini. Sebagai akibat dari pengaruh modernisasi yang menjamah hampir seluruh sudut kehidupan, kini ulama (dalam pengertian utama sebagai

⁸ Arifuddin Ismail, *Efektivitas Pendidikan Kader Ulama*, hal. 23.

⁹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006) hal. 11.

orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama) sudah bukan lagi tokoh 'segala galanya. Diversifikasi sosial, mendesakkan diversifikasi dalam fungsi dan peranan

2. Pesantren dan Reproduksi Ulama: Tantangan Modernisasi

Dengan munculnya isu-isu terkait dengan krisis ulama di Indonesia, ternyata mendorong pesantren melakukan langkah-langkah, meski secara diam-diam (tanpa publikasi yang bersifat massal), untuk melestarikan keberadaan ulama di Indonesia. Tetapi ulama, sebagaimana di sinyalir Hiroko Horikoshi, kebanyakan lahir setelah merantau pada beberapa pesantren sekitar 10-15 tahun untuk memperdalam ilmu dan mematangkan diri.¹⁰

Pada masa yang lebih awal sekolah-sekolah pesantren, surau, pondok dan merupakan fenomena pedesaan yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Ulama menyediakan pendidikan, memberikan nasehat kepada penduduk desa dan melegitimasi perayaan-perayaan. Pesantren merupakan lembaga pribadi milik ulama yang disebut kiai di Jawa, guru di Semenanjung Melayu dan 'alim di banyak tempat lain di Indonesia semua dikelola oleh keluarga mereka. Banyak sekolah tidak dapat bertahan setelah pendirinya meninggal tetapi yang lain dapat berlanjut sampai beberapa generasi. Dalam sejarahnya jadwal pendidikan dan peribadatan yang intens membuat para santri memiliki keterlibatan yang mendalam dengan guru mereka sehingga menghasilkan loyalitas dan penghormatan yang kuat. Di sekolah dan setelah lulus para ulama dapat mengandalkan mereka untuk dimintai bantuan, suatu faktor yang secara politis memiliki arti penting dalam beberapa peristiwa sejarah.¹¹

Pesantren sehubungan dengan pemelihara tradisi budaya Islam tradisional terutama gaya Sunni, peran pesantren mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Saat pusat berlangsung transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional (2) Sebagai penjaga dan penjaga kelanjutan dari Islam tradisional (3) Sebagai pusat reproduksi reproduksi ulama.

Hal ini menjadi sangat logis sekali ketika hampir semua lembaga pendidikan di Indonesia termasuk sebagian pesantren yang mulai berlomba-lomba melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, pondok pesantren dalam perkembangannya menjelma sebagai lembaga sosial yang memberikan warna khas bagi perkembangan masyarakat sekitarnya. Peranan pesantren pun berubah menjadi agen pembaharuan (*agent of change*) dan agen pembangunan masyarakat. Sekalipun demikian tetap saja yang menjadi tujuan utama adalah memahami agama.¹²

Pesantren merupakan sistem pendidikan yang tumbuh dan lahir dari kultur Indonesia yang bersifat *indigenous*. Lembaga inilah yang dilirik kembali sebagai model dasar pengembangan konsep pendidikan (baru) Indonesia. Pesantren dengan

¹⁰ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), hal. 115-140

¹¹ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 3

¹² Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 17.

demikian mulai diperhatikan dari multi perspektif sehingga tidak selalu dinilai negatif. Ada segi-segi kelemahan sistem pendidikan pesantren sehingga harus dikritik, tetapi ada juga kelebihan-kelebihan tertentu yang perlu ditiru bahkan dikembangkan.¹³

Meskipun dipesantren santri lebih mengutamakan capaian substansial keilmuan dari pada pencapaian formal, akan tetapi tetap ada tuntutan yang mendesak agar ada re-presepsi terhadap pemahaman kitab kuning yaitu bukan sekedar memahami sebagaimana ada hitam diatas putih terhadap teks yang terdapat dalam kitab kuning namun juga konteks historisnya. Atau bahkan tidak sekedar kitab kuning tapi juga mungkin kitab putih hitam merah dan biru. tuntutan untuk memahami komprehensitas konteks dari literatur klasik merupakan tuntutan yang amat mendasar sebagai syarat kualifikasi keilmuan dalam rangka menjawab berbagai tantangan global.

Modernisasi pendidikan di pesantren sejak diberlakukannya SKB Tiga Menteri (Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri dalam Negeri tahun 1975. Inti dari perubahan itu adalah adanya pembaharuan dan pemberdayaan madrasah. Diadakanlah perubahan yang drastis dalam kurikulum madrasah SKB Tiga Menteri, yakni 70 % pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama. Dengan diberlakukannya kurikulum yang seperti itu maka madrasah disetarakan dengan sekolah umum. Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah setara dengan SMA.¹⁴

Departemen Agama RI membuat empat tipologi pesantren berdasarkan kurikulum dan materi yang diajarkan. 1) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan penerapan kurikulum nasional pada satuan-satuan pendidikan keagamaan, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, atau Madrasah Aliyah; atau pun menyelenggarakan pendidikan umum seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah atas (SMU/SMK), 2) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk satuan pendidikan keagamaan (madrasah), dengan penerapan kurikulum sebagian besarnya berisi pengetahuan agama; 3) Pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan non-formal dalam bentuk madrasah diniyyah; dan 4) Pesantren yang hanya berfungsi sebagai tempat pengajian.¹⁵

Saat diberlakukannya SKB Menteri ternyata pesantren seolah sudah mulai kehilangan daya kekebalannya untuk membendung arus modernisasi dan

¹³Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Penerbit : Erlangga, tt) hal. 82

¹⁴Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta : Rineka Cipta : 2009), hal. 200.

¹⁵Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, *Direktori Pesantren Jakarta*:Depag RI, 2004, hal. 7.

westernisasi yang sudah mulai menggejala. Banyak sekali pesantren-pesantren salaf yang mulai merubah orientasi pendidikannya menjadi pola pendidikan kebarat-baratan. Menurut Kyai As'ad bukannya pesantren tidak boleh modern, akan tetapi semangat untuk mengakomodir tuntutan zaman (Modernisasi) haruslah disertai dengan konsistensi terhadap nilai-nilai yang dianut, yakni nilai-nilai salafiyah.¹⁶

Menurut Azyumardi, perubahan kelembagaan pesantren semakin mendapatkan momentumnya dalam dua dasawarsa belakangan. Hal ini terkait dengan kebijakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 1989 (kemudian diperbarui pada 2003). Pesantren-pesantren yang mengelola madrasah mengalami perubahan signifikan. UU Sisdiknas ini memosisikan madrasah menjadi setara dengan sekolah umum. Bahkan, dalam kerangka UU Sisdiknas tersebut, madrasah menjadi 'sekolah umum' berciri Islam. Sebagai konsekuensinya, sejak pemberlakuan UU Sisdiknas, madrasah mesti memberlakukan kurikulum Diknas dengan suplemen kurikulum Departemen Agama untuk beberapa mata pelajaran agama. Dengan demikian, pemerintah semakin intensif untuk mengintegrasikan lembaga dan sistem pendidikan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional. Pada sisi lain, pesantren pada klasifikasi ini semakin intensif mengadopsi dan mengintegrasikan kurikulum yang ditetapkan pemerintah ke dalam kurikulum pesantren.¹⁷

Selanjutnya pandangan Azra, pesantren di Indonesia berbeda dengan Negara di Timur Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap lembaga pendidikan tradisional pesantren yang menerima sistem dan tuntutan perkembangan zaman. sebagaimana pendidikan di lingkungan pesantren sendiri yang mengadopsi sistem pendidikan umum seperti SMA, SMK tanpa meninggalkan tradisinya seperti pengajian atau materi belajar bersumber pada kitab kuning yang merupakan ciri khas pesantren sejak awal berdirinya. Berbeda dengan apa yang terjadi di Turki Usmani, tegas Azra, sistem pendidikan di Negara tersebut pada mulanya tidak menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam sehingga tidak menjadi sasaran pembaharuan. Pada masa Turki Usmani, pembentukan sekolah baru disesuaikan sistem pendidikan Eropa yang dituju-kan untuk kepentingan reformasi militer dan birokrasi. Seperti Sultan Mahmud II melakukan pembaharuan pendidikan dengan menghadirkan sekolah Rusydiyah yang sepenuhnya mengadopsi sistem pendidikan Eropa. Sehingga madrasah tetap pada posisinya sebagai lembaga pendidikan tradisional, sedangkan sekolah Rusydiyah sebagai lembaga pendidikan modern.¹⁸

¹⁶As'ad Syamsul Arifin, *Percik-Percik Pemikiran Kiai Salaf-Wejangan Dari Balik Mimbar* (Situbondo: Bp2m P.P Salafiyah Syafiiyah, 2000), hal. 45.

¹⁷Azyumardi Azra, *Pendidikan Pesantren: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, h.105

¹⁸Azumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta : Logos Waca ilmu, 2002), hal. 118.

Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman, tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyuguhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Kekuatan otak (berpikir), hati (keimanan) dan tangan (keterampilan), merupakan modal utama untuk membentuk pribadi santri yang mampu menyeimbangi perkembangan zaman. Berbagai kegiatan keterampilan dalam bentuk pelatihan atau workshop (daurah) yang lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja adalah upaya untuk menambah wawasan santri di bidang ilmu sosial, budaya dan ilmu praktis, merupakan salah satu terobosan konkret untuk mempersiapkan individu santri di lingkungan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di lingkungan masyarakat, maka pondok pesantren harus berani tampil dan mengembangkan dirinya sebagai pusat keunggulan. Pondok pesantren tidak hanya mendidik santri agar memiliki ketangguhan jiwa (*taqwimu al-nafs*), jalan hidup yang lurus, budi pekerti yang mulia, tetapi juga santri yang dibekali dengan berbagai disiplin ilmu keterampilan lainnya, guna dapat diwujudkan dan mengembangkan segenap kualitas yang dimilikinya.

Dalam perkembangan selanjutnya, tidak jarang ditemukan pesantren yang memiliki lebih banyak siswa madrasah dibanding santri yang melakukan *tafaqquh f al-din*. Tidak hanya bereksperimen dengan madrasah, banyak pula pesantren yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada di bawah sistem Departemen (kini Kementrian) Pendidikan Nasional. Dengan kata lain, pesantren bukan hanya mendirikan madrasah, tetapi juga sekolah-sekolah umum, yang mengikuti sistem dan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Di antara pesantren-pesantren yang dipandang sebagai pioneer dalam eksperimen ini adalah Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang, yang pada tahun 1965 mendirikan Universitas Darul Ulum dan berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen P & K). Universitas ini membuka 5 Fakultas "Umum" dan hanya 1 fakultas agama Islam. Pesantren lain adalah Pesantren Miftahul Mu'allimin di Babakan Ciwaringin, Jawa Barat, yang mendirikan STM. Masa-masa lebih belakangan, eksperimen seperti ini dilakukan oleh banyak pesantren, sehingga menimbulkan banyak kalangan yang ingin mempertahankan identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk *tafaqquh f al-din*, atau mempersiapkan calon-calon ulama/kyai, bukan untuk tujuan lain, terlebih untuk menyediakan tenaga kerja.¹⁹

3. Pendidikan Kader Ulama sebagai Inisiatif Solusi

Sejalan dengan perkembangan zaman, pesantren mengalami perubahan. Sebagian pesantren tetap mempertahankan pola dan gaya pendidikan pesantren

¹⁹Abdul Basyit Pembaharuan Model Pesantren: Respon Terhadap Modernitas dalam Jurnal KORDINAT Vol. XVI No. 2 Oktober 2017, hal. 315.

salaf, tetapi sebagian yang lain bersikap kooperatif terhadap perubahan. Banyak pihak sepakat bahwa kaderisasi ulama adalah program yang sangat penting bagi kemajuan Islam dan umatnya. Sehingga program ini mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak ormas Islam (MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama).

Reformulasi kelembagaan pendidikan pesantren merupakan alternatif berikutnya, sebagai perpanjangan atas perubahan tujuan pendidikan pesantren, kerana perubahan tujuan tanpa adanya wadah atau lembaga yang memiliki nafas yang sama, maka terjadi kekaburan atas tujuan dan target itu sendiri. Dengan bahasa sederhana tidak mungkin pembentuk kader-kader ulama diserahkan pada lembaga-lembaga formal seperti SMP/ MTs, SMA/ MA, karena mereka punya beban untuk menstadarkan dengan kurikulum nasional, sehingga tidak mungkin mampu sebuah lembaga untuk memberlakukan dua kurikulum yang berbeda dengan beban dan kajian yang berbeda. Oleh karena itu, keputusan untuk mendirikan lembaga baru yang khusus untuk mencetak kader-kader ulama dan kekhasan kurikulum dan tujuan yang jelas, adalah pilihan tepat, dan menjawab kegelisahan masyarakat dan alumni. Sebagai percontohan adalah Pesantren Tebuireng Jombang, KH. Salahudin Wahid yang akrab disapa “Gus Solah” dalam berbagai kesempatan menegaskan, jika ingin mondok di Tebuireng dengan tujuan untuk menjadi kader ulama atau kyai, maka berlajarlah di Madrasah Mua’llimin dan Ma’had Aly Hasyim Asyari.²⁰

Pada Dekade ini Salah satu di antara peran MUI mendirikan lembaga Pendidikan Kader Ulama (PKU) berbagai daerah di Indonesia disebabkan keberadaan para ulama senior semakin berkurang sebab satu persatu dipanggil Allah swt. kehadirat-Nya. Selain itu juga memperhatikan perkembangan pendidikan yang tidak semuanya dapat menyiapkan kader-kader (generasi) ulama, sementara keberadaan ulama senantiasa diperlukan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai serta meyakinkan.

Walaupun pendidikan kader ulama mampu menjadi solusi melahirkan kompetensi seorang ulama namun di satu sisi terjadi problematika ketika berbicara legalitas alumninya ketika ingin bekerja secara formal seperti contoh Problematik kelembagaan Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini adalah keberadaan atau akreditasinya belum dikatakan sebagai pendidikan formal masih bersifat non formal yang belum terdaftar di Dikti. Sehingga menjadi suatu kendala dalam persaingan terhadap perguruan tinggi yang lainnya, memang sudah semestinya suatu perguruan tinggi apabila telah menjelang kepada status sarjana mesti telah diakui diberbagai lapisan masyarakat, akan tetapi status kelembagaan Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara masih

²⁰ mam Sabhi, Rekonstruksi Pendidikan Pesantren Dalam Pembentukan Kader Ulama, dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 1, Pebruari 2016, hal. 63.

banyak ditemui bahwa masyarakat masih bertanya-tanya sehingga muncul argumen apakah memang ada lembaga pendidikan di lingkungan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu di masa yang akan datang berharap kiranya ada solusi yang dapat memecahkan problematik yang berkepanjangan ini. Karena apabila tidak segera dilakukan penyelesaiannya maka selalu yang mejadi problematik dari Pendidikan Tinggi Kader Ulama selalu tentang akreditasi kelembagaannya yang sampai saat ini belum di akui, sehingga imbas dari itu akan dialami oleh alumninya yang selalu kesulitan dalam ranah pekerjaan dan karirnya kedepan.²¹

4. Kitab Kuning sebagai Dasar Kompetensi dalam Konteks Regenerasi Ulama

Kitab kuning menjadi salah satu sistem nilai dalam kehidupan pesantren. Karena itu, pembelajaran dan pengkajian kitab kuning menjadi nomor satu dan merupakan ciri khas pondok pesantren. Kitab kuning menjadi sesuatu yang substansial sebagai rujukan. Oleh karena itu, perkembangan pondok pesantren yang semakin dinamis dan mengikuti perkembangan pendidikan secara nasional, pondok pesantren tetap mempertahankan kitab kuning sebagai bahan pembelajaran baik pada pesantren salafiyah maupun kholafiyah.

Pendapat Martin van Bruinessen tentang adopsi sistem halaqah yang dilakukan oleh para santri Indonesia bisa dipahami, mengingat bahwa pada akhir abad ke 19 ketergantungan umat Islam Indonesia terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Timur Tengah, terutama ulama dari Kairo dan Makkah sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah buku yang berjudul *Muhimmat al-Nafâis*. Buku tersebut berisi fatwa-fatwa yang mengacu kepada beberapa isu yang berkembang di Nusantara (Indonesia) pada saat itu. Buku tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 1892 di Makkah. Kemudian pada tahun 1913 buku tersebut banyak dijual di toko-toko kitab Muslim di Indonesia.²²

Bagaimanapun Kitab Kuning menjadi hal yang penting bagi kalangan pesantren bahkan bagi mereka yang mencap dirinya sebagai pesantren reformis semisal pesantren-pesantren milik organisasi Muhammadiyah dan juga pada pesantren yang berafiliasi pada Islam puritan seperti milik Persis. Adapun pada pesantren-pesantren tradisional hingga saat sekarang masih tetap menggunakan Kitab-Kitab Kuning ini sebagai bahan baku utama dalam pengajaran materi agama pada para santrinya. Pesantren yang berafiliasi dengan Persis biasanya memiliki link yang lebih kuat dengan dunia Islam Timur Tengah kontemporer sehingga kitab-kitab muta'akhirah lebih banyak dipakai daripada pesantren salaf, sedangkan pada

²¹Muhari Syahlaili Saragih et. al, *Problematik Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesiasumatera Utara Dalam Melahirkan Ulama Di Masyarakat Sumatera Utara dalam At-Tazarki Vol.3 No.1 Januari-Juni 2019*, hal. 128.

²²Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 34.

model pesantren reformis biasanya kitab-kitab yang digunakan berkisar pada tafsir dan hadis serta lebih menyukai kitab-kitab terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bukannya pada kitab fiqh klasik berbahasa Arab walau juga untuk kategori ini kitab klasik juga ditemukan di pesantren reformis sebagai koleksi para santri secara pribadi.²³

Kitab klasik yang lebih dikenal dengan nama kitab kuning mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Menurut Azyumardi Azra, Kitab Kuning mempunyai format sendiri yang khas dan warna kertas kekuning-kuningan, kitab ini lebih dikenal dengan kitab kuning. Akan tetapi akhir-akhir ini ciri-ciri tersebut telah mengalami perubahan. Kitab kuning cetakan baru sudah banyak memakai kertas putih yang umum dipakai di dunia percetakan. Juga sudah banyak yang tidak "gundul" lagi karena telah diberi syakl untuk memudahkan santri membacanya. Sebagian besar kitab kuning sudah dijilid.²⁴

Kitab kuning memiliki lima dasar yaitu: 1) Mengulas pembagian sesuatu yang umum menjadi khusus, sesuatu yang ringkas menjadi terperinci, dan seterusnya. 2) Menyajikan redaksi yang teratur dengan menampilkan beberapa pernyataan dan kemudian menyusun kesimpulan. 3) Membuat ulasan tertentu ketika mengulangi uraian yang dianggap perlu, sehingga penampilan materinya menarik dan pola pikirnya dapat lurus. 4) Memberikan batasan-batasan jelas ketika penulisnya menurunkan sebuah definisi. dan 5) Menampilkan beberapa ulasan dan argumentasi terhadap pernyataan yang dianggap perlu.²⁵

Penyebaran literatur keagamaan klasik selanjutnya diteruskan oleh para ulama melalui pengajian di rumah atau lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, manasah, surau, rangkang dan lainnya. Di tempat-tempat tersebut kitab-kitab klasik terus dipelajari dan dikembangkan dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam di nusantara. Dan untuk itu tidak aneh kalau hubungan literatur klasik (kitab kuning) dengan pesantren tidak bisa dipisahkan, bahkan sampai saat ini masih tertanam anggapan masyarakat bahwa pesantren identik dengan kitab kuning. Menteri Agama Tarmizi Tahir pernah mengatakan tentang kitab kuning "Pedoman Umat Islam adalah Alquran dan Hadis, namun kupasan dan tafsir para ulama yang dituangkan dalam kitab-kitab kuning akan memperluas wawasan dan memperkaya alternatif bagi umat Islam untuk memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang ada dalam kitab kuning seringkali mewarnai praktek keagamaan umat baik yang menyangkut peribadatan, sosial, perekonomian maupun hukum Islam

²³ *Ibid*, hal. 37.

²⁴ Azumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi Menuju Milenium Baru*, hal. 111.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru), hal. 336.

Berkaitan dengan tugas ulama sebagai pemberi fatwa menurut, Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan persyaratan berfatwa menurut Imam asy-Syafi'i bahwa tidak boleh berfatwa dalam agama Allah kecuali orang yang: (1) mengetahui Alquran dengan nāsikhdanmansūkh, (2) mengetahui hadis sebagaimana pengetahuannya tentang Alquran, (3) mengetahui bahasa Arab, (4) mengetahui syair Arab dan ilmu alat yang dibutuhkan untuk memahami Alquran dan Hadis, dan (5) mengetahui perbedaan pendapat para ulama di berbagai kota.²⁶

C. KESIMPULAN

Pergeseran posisi dan peran ulama di tengah perkembangan komunitas sosial budaya yang disebabkan oleh pandangan, Asumsi dan kenyataan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang kemampuan keilmuan dan kealiman ulama. Pergeseran tersebut juga muncul dari sikap dan pribadi ulama tersebut secara langsung yang ditampilkannya dari peran dan pelaksanaan sosial keagamaan ulama tersebut terhadap masyarakat disatu sisi pesantren yang menerima sistem dan tuntutan perkembangan zaman. sebagaimana pendidikan di lingkungan pesantren sendiri yang mengadopsi sistem pendidikan umum seperti SMA, SMK tanpa meninggalkan tradisinya seperti pengajian atau materi belajar bersumber pada kitab kuning yang merupakan ciri khas pesantren sejak awal berdirinya. Sebagai solusinya ormas Islam seperti MUI mendirikan lembaga Pendidikan Kader Ulama (PKU) berbagai daerah di Indonesia disebabkan keberadaan para ulama senior semakin berkurang sebab satu persatu dipanggil Allah swt. kehadirat-Nya. Selain itu juga memperhatikan perkembangan pendidikan yang tidak semuanya dapat menyiapkan kader-kader (generasi) ulama, sementara keberadaan ulama senantiasa diperlukan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai serta meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifuddin Ismail, Efektivitas Pendidikan Kader Ulama di Berbagai Pesantren Dalam Jurnal "Al-Qalam" No. XVII Tahun XII Edisi Januari-Juni 2006.

Muhtarom, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Fatimah Zuhrah, Pergeseran Peran Dan Posisi Ulama Pada Masyarakat Melayu Di Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dalam HIKMAH, Vol. XII, No. 1 Tahun 2016,

Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1986)

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lāmal-Muwaqqi'īn* (Be rut Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 37

- Ramli Abdul Wahid, *Peranan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler* (Bandung: Citapustaka Media, 2014).
- Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006).
- Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987).
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006).
- Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Penerbit : Erlangga, tt).
- Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta : Rineka Cipta : 2009).
- Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, *Direktori Pesantren Jakarta:Depag RI, 2004.*
- As'ad Syamsul Arifin, *Percik-Percik Pemikiran Kiai Salaf-Wejangan Dari Balik Mimbar* (Situbondo: Bp2m P.P Salafiyah Syafiiyah, 2000), h. 45
- Azumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta : Logos Waca ilmu, 2002).
- Abdul Basyit *Pembaharuan Model Pesantren: Respon Terhadap Modernitas dalam Jurnal KORDINAT Vol. XVI No. 2 Oktober 2017*, h. 315.
- Imam Sabhi, *Rekonstruksi Pendidikan Pesantren Dalam Pembentukan Kader Ulama*, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 1, Pebruari 2016.
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996).
- Azumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi Menuju Milenium Baru*).
- Abdul Aziz Dahlan et.al, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru).
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lāmal-Muwaqqi'in* (Be rut Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).